

MODEL HARMONISASI ORANG TIDORE UNTUK PENGUATAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Andi Sumar Karman¹, Safrudin Abdulrahman², Tasrifin³, Nurlinah⁴

Prodi Antropologi Sosial Universitas Khairun^{1,2}, Jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin^{3,4},
Pos-el: andisumarkarman@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang model harmonisasi masyarakat multikultural berbasis identitas lokal Kesultanan Tidore dalam kerangka integrasi antar etnik di Maluku Utara. Dengan latar kebangkitan identitas masyarakat Tidore dalam konteks masa kini, berbagai praktik budaya telah dikembangkan masyarakat dan kesultanan Tidore dalam menguatkan identitas mereka. Komunitas budaya berperan sebagai agen kebangkitan identitas ke-Tidore-an di Maluku Utara. Tahapan dalam merumuskan model yakni melakukan proses pengumpulan, Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder (informan, komunitas adat, pemerintah dan tokoh masyarakat/agama/pemuda), dan merumuskan model. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai multikultural menjadi landasan dalam setiap aktivitas individual dan kolektif orang Tidore. Hal ini berlaku dalam sistem kepemimpinan tradisional (sultan dan perangkat kesultanan) dan modern (wali kota dan struktur pemerintahan paling bawah). Nilai-nilai multikulturalisme dalam aspek politik dan organisasi masyarakat Tidore dapat dilihat dalam hal penghargaan pada perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas. Lembaga-lembaga politik lokal (formal/modern dan informal/tradisional) menjalankan fungsi dan tugasnya di atas nilai-nilai multikulturalisme tersebut. Model harmonisasi masyarakat multikultural yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan memberikan dukungan untuk regulasi kebijakan sosial yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah dan stakeholders lainnya. Model ini menjadi dasar perubahan dan perbaikan kebijakan sosial terutama berkaitan dengan harmonisasi masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Model harmonisasi, Orang Tidore, Multikultur

A. PENGANTAR

Fenomena kebangkitan tradisi dan identitas dalam dinamika politik lokal di Maluku Utara menunjukkan hal positif dalam upaya menghidupkan kembali nilai-nilai positif dalam budaya setempat. Dikaitkan dengan globalisasi, berbagai nilai budaya dikatakan tergerus, dan berdampak pada terputusnya pewarisan tradisi antargenerasi. Pada sisi lain, hal ini dapat menjadi ancaman juga bagi keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemujaan tradisi sendiri secara berlebihan dapat berdampak pada pengabaian 'luar kelompok'. Etnis Tidore di Maluku Utara menggunakan berbagai saluran dan cara dalam upaya membangun kembali dan mengembangkan identitas kelompoknya. Secara positif, berbagai potensi dari tradisi dapat dikenali dan dikembangkan dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih luas untuk mewujudkan keharmonisan sosial antarsuku-bangsa di Maluku Utara. Sebaliknya, nilai-nilai yang menghambat terwujudnya keharmonisan sosial tadi dapat diantisipasi lebih dini.

Maluku Utara merupakan salah provinsi di Indonesia dengan komposisi keragaman penduduk yang tinggi. Secara sosial budaya, masyarakat Maluku Utara terdiri dari 32 suku bangsa (etnik) lokal, belum termasuk puluhan etnik pendatang dari luar Maluku Utara. Kalangan pendatang, meski generasinya banyak sudah yang lahir dan besar di Maluku Utara, tetap saja dianggap 'pendatang'. Pandangan ini menyebabkan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya tertentu. Agama penduduk Maluku Utara juga menunjukkan keragaman. Konflik horizontal pada 1999 silam, yang oleh beberapa kalangan menunjuk agama sebagai faktor pemicunya atau sesuatu yang dikonstruksi dalam perkembangan konflik yang terjadi (Sumar-Karman dkk, 2013/2014).

Penelitian ini berfokus pada etnik Tidore di Maluku Utara. Dinamika politik etnik Tidore menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Institusi kultural yang menjadi wadah bagi proses-proses dinamis tersebut mulai dari kelompok pemuda dan mahasiswa, komunitas budaya, kesultanan Tidore, pemerintah daerah, dan lain-lain. Berbagai gejala-gejala kebangkitan bekas kerajaan atau kesultanan di atas sebenarnya sudah pernah diprediksi oleh Niels Bubandt (2004:15). Bubandt meyakini bahwa terdapat suatu hubungan baru antara politik dan budaya yang sedang berlangsung saat itu, ketika representasi fenomena budaya seperti 'tradisi' dan 'agama' menjadi sumber daya politik utama.

Kebangkitan identitas masyarakat Tidore saat ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial budaya, yakni: bidang seni budaya, pelestarian dan pemapanan tradisi, gagasan otonomisasi Tidore dalam bingkai NKRI, pandangan sejarah dan dualisme pemerintahan, pembatasan fisik dan sosial, dan penyebarluasan identitas. Berbagai praktik budaya telah dikembangkan masyarakat dan kesultanan Tidore dalam menguatkan identitas mereka tersebut, antara lain melalui organisasi komunitas dan kegiatannya. Peran-peran komunitas budaya sebagai agen kebangkitan identitas ke-Tidore-an di Maluku Utara, terwujud dalam dua bentuk komunitas, yakni: (1) komunitas atau lembaga secara jelas menunjuk sasaran pada masyarakat dan kebudayaan Tidore, (2) komunitas atau lembaga yang tidak secara langsung menunjuk sasaran pada masyarakat dan kebudayaan Tidore.

Sebagai bagian dari hasil penelitian, artikel ini dipandang sebagai usaha untuk mengungkapkan sebuah keberadaan model harmonisasi yang dapat digunakan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang bersifat multikultur. Isu kebangkitan etnis lokal ditempatkan dalam bingkai masyarakat multikultural untuk menemukan model

harmonisasinya. Dalam perjalanannya, model harmonisasi orang Tidore telah terbukti mampu menekan konflik antaretnik yang mungkin terjadi dalam interaksi antaretnik sebagaimana yang akan dipaparkan berikut.

B. METODOLOGI

Ada empat teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: studi dokumen, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Studi dokumen digunakan untuk menjangkau data dan informasi yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan Tidore, terutama mengenai kesultanan Tidore. Sumber data di sini meliputi buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, buletin, arsip kesultanan dan pemerintah Tidore, dan berbagai dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

Teknik observasi (pengamatan) digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai aktivitas orang Tidore baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang merepresentasikan identitas mereka. Demikian pula perilaku dan tindakan-tindakan orang Tidore dalam berinteraksi dengan etnis lain dalam kehidupan sosial. Selain itu, pengamatan juga dilakukan kepada komunitas budaya Tidore, organisasi masyarakat Tidore, kesultanan Tidore, pemerintah Kota Tidore, kelembagaan adat (sowohi), organisasi mahasiswa Tidore, dan media sosial milik orang atau komunitas Tidore.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan kepada informan dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat, anggota kelompok komunitas budaya, organisasi mahasiswa Tidore, organisasi masyarakat Tidore, kesultanan Tidore, dan instansi pemerintah Tidore. Topik wawancara, secara garis besar, mencakup pandangan informan tentang orang Tidore (insider) dan orang luar Tidore (outsider), persepsi tentang masa lalu, visi budaya (masa depan), dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan menunjukkan eksistensinya.

Metode diskusi kelompok terfokus (Focus group discussion, FGD) merupakan cara pengumpulan data kualitatif yang secara esensial yang melibatkan keterlibatan sejumlah kecil orang dalam kelompok diskusi informal yang difokuskan pada topik-topik khusus atau isu-isu tertentu (Wilkinson, 2004:177). Partisipan kelompok diskusi meliputi kelompok mahasiswa dan pemuda Tidore, komunitas budaya, organisasi masyarakat Tidore, tokoh masyarakat/adat Tidore, Kesultanan Tidore.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keragaman Budaya Masyarakat Tidore

Pasca reformasi di Indonesia, banyak kalangan yang mewacanakan tentang bang- kitnya kembali kesadaran identitas budaya dan identitas etnik di Indonesia, khususnya pada berkembangnya gerakan-gerakan sosial yang berupaya untuk memunculkan kembali eksistensi masyarakat lokal maupun identitas budaya lokal. Manifestasi yang beragam hingga tingkat ekstrim mengartikulasikan kembali proses pembentukan suatu identitas dengan tujuan untuk menegaskan kembali keberadaan suatu entitas sosial yang khas, atas dasar adanya kesamaan budaya, asal usul, kekerabatan, bahasa, agama, territorial, dan setimen primordial hingga kadang berkembang menjadi sebuah perlawanan terhadap negara yang mengancam integrasi bangsa dan harmoni sosial (Tahara, 2014).

Kebangkitan identitas orang Tidore merupakan relasi mereka atas kelompok lain yang, Murray Li (2012) sebutkan, berbentuk “pengarahan perilaku” seperti mengarahkan minat, membentuk kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan. Dalam hal memperbaiki kehidupan kelompoknya, mereka sadar atas rasional yang khas yakni “jalan penting untuk menata kehidupan”. Dengan munculnya politik identitas orang Tidore dalam bentuk gerakan-gerakan konstruksi identitas etnik, semestinya pemerintah memahami dan memberi ruang bagi orang Tidore dan memperkuat pemahaman multikulturisme. Di sisi lain, perlu menciptakan kondisi struktural yang menjamin heterogenitas komunitas, terutama mengurangi rasisme institusional dengan tidak membatasi ruang gerak suatu kelompok tertentu dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik. Identitas etnik dan hidup harmoni berdampingan antaretnik berfungsi sebagai norma regulasi interaksi. Dengan memberi ruang kultural orang Tidore, maka kondisi ini menjadi perekat bangsa Indonesia sebagai negara yang multietnik dan beragam budaya.

Gagasan Robinson (2000:50) setidaknya dapat dimanfaatkan dalam mengungkap dan menjelaskan berbagai identitas orang Tidore beserta dinamikanya dalam kerangka politik mereka. Proses-proses politik ternyata mnejadi salah satu penentu arah pengelolaan perbedaan dan artikulasinya dalam kehidupan sosial. Pandangan ini dapat menjadi pijakan bagi penjelasan tentang proses politik di tingkat lokal pada orang Tidore yang mengartikulasikan perbedaan (identitas) mereka dengan kelompok lain (outsider) untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Kelompok etnis Tidore merupakan kelompok yang dominan di Kota Tidore Kepulauan. Selain merupakan etnis asli, atau etnis tempatan, di Kota Tidore Kepulauan, kelompok ini juga menguasai berbagai sektor penting di daerah ini. Etnis Tidore dengan peranan kesultanan Tidore di masa lalu di lembaran sejarah mengekalkan kedudukan dan peranan etnis ini sebagai etnis dominan di Tidore Kepulauan. Pengaruh kesultanan ini hingga ke wilayah Papua—dan terus terjalin hingga saat ini—mengukuhkan klaim tersebut.

Demikianlah sehingga ekspresi budaya dominan di wilayah Tidore Kepulauan adalah budaya Tidore. Berbagai tradisi, kesenian, dan adat istiadat secara dominan mewarnai kehidupan sosial budaya di Tidore Kepulauan. Beberapa contoh tradisi, misalnya, barifola, ritual salai jin, dan dabus, adalah tradisi khas Tidore. Akhir-akhir ini, semangat kebangkitan (kembali) masyarakat dan kebudayaan Tidore dapat diamati melalui berbagai pertunjukan seni dan budaya, misalnya melalui festival budaya Tidore yang digelar secara rutin setiap tahun. Dukungan kesultanan Tidore, pemerintah kota Tidore Kepulauan, komunitas, dan masyarakat Tidore memungkinkan semua ini terjadi.

Kondisi kehidupan sosial budaya di Kota Tidore Kepulauan relatif homogen. Meski demikian, kehadiran etnis lain tetap mendapat ruang untuk hidup dan berkembang di wilayah ini. Kelompok-kelompok etnis yang lain, baik dari dalam Maluku Utara maupun dari luar Maluku Utara, secara layak dan setara hidup berdampingan dengan etnis tempatan, yakni etnis Tidore.

Beberapa kelompok etnis di wilayah Tidore Kepulauan meliputi: etnis Ternate, Makeang, Bugis, Jawa, Ambon, Papua, Tabaru, Sanana, dll. Interaksi antaretnis beserta ekspresi kebudayaannya berlangsung harmonis. Baik berdasarkan perbedaan etnis maupun agama, suasana harmonis tetap terjalin dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan sehari-hari.

Jauh sebelum kedatangan orang Arab di Maluku Kie Raha, pulau Tidore dikenal dengan sebutan Kie Marijang, artinya “puncak gunung yang begitu indah”, atau disebut Kie Doku, yang berarti “gunung berapi.” Menurut mitologi orang Tidore, dahulu setiap komunitas atau soa (marga) dipimpin oleh seorang kepala marga yang dinamai momole, artinya orang yang sakti atau berilmu. Momole yang terdapat di Marijang, dahulu sering bertikai untuk merebut wilayah kekuasaan yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan

pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian ini selalu mengalami kegagalan.

Suatu ketika, diperkirakan tahun 846 M, rombongan Ibnu Chardazabah, utusan Khalifah al-Mutawakkil dari Kerajaan Abbasiyah di Baghdad tiba di Marijang. Pada saat itu, sedang terjadi pertikaian antar momole. Untuk meredakan dan menyelesaikan pertikaian tersebut, salah seorang anggota rombongan Ibnu Chardazabah, bernama Syech Yakub, memfasilitasi para momole untuk melakukan perundingan. Dalam bahasa Tidore, perundingan ini disebut Togorebo. Pertemuan disepakati di atas sebuah batu besar yang terletak di kaki gunung Marijang. Kesepakatanannya, momole yang tiba paling cepat ke lokasi pertemuan akan menjadi pemenang dan memimpin pertemuan. Dalam peristiwa itu, setiap momole yang sampai ke lokasi pertemuan wajib meneriakkan *To ado re*. Teriakan ini merupakan bentuk penanda bahwa ia telah sampai di puncak Marijang. Sepanjang pendakian ke puncak Marijang, ternyata para momole yang bertikai tersebut tiba pada saat yang sama, sehingga tidak ada yang kalah dan menang. Berselang beberapa saat kemudian, Syech Yakub juga tiba di lokasi dan berujar dengan dialek Iraknya: *Anta thadore*. Karena para momole datang pada saat yang bersamaan, maka tidak ada yang menjadi pemenang, akhirnya yang diangkat sebagai pemimpin adalah Syech Yakub. Konon, sejak saat itu mulai dikenal kata Tidore, kombinasi dari dua kata: *Ta ado re* dan *Thadore*, artinya “aku telah sampai.” Demikianlah, kata Tidore akhirnya menggantikan kata *Kie Duko* dan Marijang menjadi nama sebuah pulau dan nama kerajaan.

Kehadiran para mubaligh dari Irak telah membawa nuansa baru bagi Tidore dan masyarakatnya. Setidaknya, telah tercipta integrasi budaya dan tata pemerintahan pasca dimulainya Tidore terjun dalam kancah politik dan persaingan supremasi kekuasaan dengan Kesultanan Ternate. Saat Sultan Nuku (1796-1805) naik takhta, kerajaan Tidore memiliki vasal-vasal yang luas yang dimiliki kesultanan Tidore, yang meliputi pulau Halmahera bagian Timur, Seram Timur hingga membentang ke Papua menjadi fakta historis yang tak terbantahkan betapa jayanya kesultanan Tidore di masa silam.

Tercatat pula dalam sejarah bahwa sejumlah pemimpin-pemimpin politik dan spiritual, bahkan tokoh-tokoh agama dan ulama negeri ini, terpaksa mengangkat kaki dari negerinya sendiri. Mereka lalu hidup di bumi pengasingan seperti di Digul Papua dan Nusakambangan. Bahkan ada yang sampai di Robbin Island, suatu tempat di semenanjung Afrika Selatan.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Tidore mendapat penghargaan dan kepercayaan dari pemerintah sebagai ibu kota perjuangan pembebasan Irian Barat, dengan Ibu negerinya Soasio dan Gubernurnya Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore yang ke-35). Sultan ini juga sangat besar jasanya dalam pengembalian Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Irian Barat diakui kedaulatannya, Tidore mengalami nasib yang mengambang sekian puluh tahun. Statusnya kemudian berubah ketika ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten Halmahera Tengah dengan enam kecamatan. Kabupaten ini juga tidak berjalan lama. Selama kurang lebih 12 tahun lamanya, akhirnya dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan.

2. Harmonisasi Orang Tidore Sebagai Suatu Model Penguatan Masyarakat Multikultur

Provinsi Maluku Utara memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan keberagaman masyarakat di masa lalu. Konflik sosial yang meletup pada penghujung 1999 silam dan terus terus berlanjut hingga awal 2000 merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah mengelola keberagaman masyarakat di daerah ini. Provinsi yang dihuni sedikitnya sebanyak 32 suku bangsa lokal, belum termasuk mereka yang disebut pendatang, memiliki kerentanan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Studi sosial budaya perlu terus dilakukan untuk menemukan cara-cara merawat dan mempertahankan situasi harmonis dalam kehidupan sosial. Salah satu pendekatan dalam ilmu humaniora adalah multikulturalisme.

Paham multikultural mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesedarajatan, baik secara individu maupun kebudayaan (Fay dalam Lubis, 2004: 121). Bagi Fay, perbedaan-perbedaan budaya, etnis, lokalitas, bahasa, ras, bangsa, dll dapat dilihat sebagai mozaik yang memperindah masyarakat.

Christine Inglis (1996) menyebutkan tiga makna multikulturalisme. Pertama, berdasarkan gambaran demografinya, multikulturalisme mengacu pada kenyataan adanya keragaman etnis dan budaya. Kedua, dalam nuansa normatif-ideologis, multikulturalisme menggunakan argumen filosofis yang menggarisbawahi legitimasi, pengakuan terhadap klaim-klaim kesadaran, dan penerimaan atas kelompok-kelompok identitas partikular. Ketiga, multikulturalisme dalam nuansa pragmatisme berkaitan dengan kerangka politik yang dibuat untuk merespons dan menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh keragaman. Terkait dengan ini,

Ubaidillah (2002) mengemukakan bahwa ada juga yang lebih mengkhususkan hanya pada isu-isu menyangkut keragaman etnis, kebudayaan, dan artikulasi-artikulasi politiknya. Politik multikultur, menurut Ubaidillah, berkenaan dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah bagi publik (public policy) atas merebaknya permasalahan yang mengiringi keragaman. Permasalahan ini dapat mencakup konflik antara pendatang dan pribumi sebagai akibat migrasi, perselisihan atau rekonsiliasi etnis ataupun ras, kekerasan, akulturasi, asimilasi budaya, ketegangan antar-agama dan bahasa.

Suparlan (2000) memandang multikulturalisme ke dalam beberapa garis besar, yakni: konsep masyarakat majemuk (multikultural), masyarakat majemuk Indonesia, masyarakat majemuk dan demokrasi masyarakat sipil, dan kesukubangsaan dan ancamannya bagi otonomi daerah. Berbagai gagasan Suparlan ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan dinamika identitas dan politik orang Tidore.

Dengan menggunakan model kebangkitan orang Tidore dan kemampuannya secara kreatif memanfaatkan berbagai sumber daya di dalam masyarakat dan kebudayaan mereka, maka model harmonisasi masyarakat multikultural dalam konteks Maluku Utara dapat dirumuskan.

Berdasarkan potensi yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan orang Tidore, terdapat tiga aspek yang perlu terus dibina, yakni kapasitas adat, kapasitas politik, dan penguatan peran pemuda pada ranah politik. Berdasarkan ketiga aspek ini, diabstraksi nilai-nilai budaya berbasis multikultural yang berkontribusi dalam membangun Maluku Utara di masa yang akan datang.

a) Penguatan Kapasitas Adat

Di Pulau Tidore terdapat kesatuan masyarakat kecil yang disebut Soa. Mereka mendiami suatu wilayah yang disebut Dukuh. Kepala atau pemimpin Soa disebut Fomanyira yang artinya orang tertua. Selanjutnya beberapa Soa membentuk satu kampung yang dikepalai oleh seorang Gimalaha. Gimalaha kemudian membentuk persekutuan yang lebih besar yang disebut Boldan. Boldan dikepalai oleh seorang Kolano. Keadaan ini berlaku pula di Ternate dan Bacan. Boldan adalah suatu bentuk politik yang dikuasai oleh Kolano dan dapat dikatakan sebagai awal dari kerajaan di Maluku Utara. Sebutan Boldan dan Kolano kemudian menghilang dan diganti dengan Sultan.

Sultan adalah kepala pemerintahan yang tertinggi dimana dalam pemerintahannya itu, Sultan dibantu oleh tiga orang pejabat tinggi lainnya yaitu Jogugu

atau Wakil Sultan, Kapita Lao yang mengurus armada Kerajaan dan Hukom yang dapat disamakan dengan Hakim Tinggi. Ketiga pejabat Negara ini masuk dalam badan pemerintahan yang dinamakan Bobato Medopolo Jogugu sebagai kepala Bobato, Kapita Lao yang bertanggung jawab atas masalah-masalah keamanan dan peperangan, sedangkan Hukom atau Hukom Soa Siwa mengurus masalah-masalah dalam negeri. Khusus untuk Hukom Soa Siwa ini mempunyai peranan dan memiliki kekuasaan besar, karena pengangkatan seorang Sultan baru adalah termasuk didalam Hukom Soa Siwa. Demikian pula segala keputusan penting yang diambil oleh Sultan atau ketiga pegawai tinggi lainnya harus mendapat persetujuan Hukom Soa Siwa.

Apabila Hukom Soa Siwa menangani masalah-masalah dalam negeri maka untuk urusan luar negeri diserahkan kepada Hukom Sangaji. Dibawah badan pemerintahan Bobato Medopolo terdapat suatu dewan bangsawan yang disebut Bobato Nyoigimoi Se Tofkanga yang berjumlah 18 orang dimana ke 18 orang anggota ini berasal dari marga Soa Siwa sebanyak 9 orang dan marga Sangaji sebanyak 9 orang. Mereka yang berhak mejadi anggota dewan ini adalah para Gimalaha yang berjumlah 5 orang dan Fomanyira sebanyak 4 orang. Gimalaha dan Sangaji adalah wakil-wakil Sultan yang memerintah di daerah-daerah, sedangkan Fomanyira adalah Kepala Soa yang juga dinamai Orang Kaya.

Dewan Bobato Nyoigimoi Se Tofkanga berfungsi untuk meletakkan adat istiadat sekaligus mengendalikan serta mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu pula ada semacam Dewan Perwakilan Rakyat dinamakan Gamraha. Anggotanya terdiri dari marga-marga Soa Siwa, Sangaji, Heku dan Cim. Mereka bertugas dalam mencalonkan seorang Sultan, yang biasanya sesuai tradisi dan adat adalah berasal dari keturunan tertentu, dan haruslah seorang anak lelaki pertama dari Sultan. Pejabat penting lain di dalam pemerintahan Sultan ialah Salahakan. Jabatan ini merupakan perwakilan Sultan untuk daerah-daerah otonom yang letaknya jauh dari pusat kerajaan.

Mengenai urusan keagamaan didalam pemerintahan dikenal ada suatu badan adat yang disebut Jou Lebe (Badan Syara). Badan ini dikepalai oleh Kadhi atau Kalem, yang anggotanya terdiri dari para Iman dan Khatib. Adapun untuk urusan sehar-ihari di dalam istana dikelola oleh suatu badan yang disebut Ngofangare. Badan ini terperinci dalam urusan rumah tangga Istana dan Urusan Keamanan.

Urusan dalam Rumah Tangga Kesultanan terdiri dari beberapa pejabat dengan tugas masing-masing yakni Imam Sadara yaitu ajudan pribadi Sultan, Imam Sawohi yaitu menangani urusan Protokol Kesultanan, Syahbandar yaitu yang mengurus pelabuhan, Urusan Perdagangan, Sadaha Kadato yaitu yang mengurus Sekretaris Kesultanan, dan Tuli Lamo yaitu yang mengurus Sekretariat Kesultanan. Sementara urusan keamanan terdiri dari 2 unsur utama yaitu Kapita Kie berfungsi sebagai komandan, yang membawahi Sadaha Kie, Letnan-Letnan, Sajeti, Marinyo dan Kebo, dan Pasukan Kehormatan terdiri dari 3 unsur juga yaitu Baru-Baru, Orimaahi dan Opas Salaka. Pada umumnya pasukan kehormatan dikepalai langsung oleh putera-putera Sultan dengan pangkat Mayor Ngofa dan Letnan Ngofa.

Dengan kata lain aparat pembantu Sultan yaitu suatu lembaga adat yang dikenal dengan nama "Bobato Adat". Lembaga adat biasanya dibagi-bagi dalam dua bagian yaitu: Bobato Akhirat dan Bobato Dunia. Bobato Dunia berfungsi sebagai badan legislatif dan memberi nasehat tentang hal-hal yang menyangkut soal-soal keagamaan, sedangkan Bobato Akhirat mengurus hal-hal yang berhubungan dengan warga, yaitu Soa Heku dan Soa Cim.

Didalam perkembangan masyarakat di Maluku Utara, khususnya dalam bidang pemerintahan masyarakat mulai mengenal tiga penggolongan yakni Golongan Sangaji, Golongan Manyira, dan Golongan Mahimo. Golongan Sangaji adalah golongan tertinggi dalam masyarakat dan mereka terdiri dari keluarga Sultan dan Para Bangsawan Keraton. Golongan Manyira adalah golongan menengah dalam masyarakat dan terdiri dari Kaum Bangsawan Bukan Keraton termasuk didalamnya puteri-puteri dari selir Sultan. Adapun golongan Mahimo adalah golongan terendah dalam masyarakat. Mereka ini terdiri dari para pedagang, petani, budak keratin dan bangsawan serta rakyat dari daerah taklukan. Khusus untuk golongan ini mereka tidak berhak untuk memegang pucuk pimpinan dalam masyarakat.

Di dalam dunia kepemimpinan, Sultan memegang pucuk pemerintahan dan berkuasa serta berpengaruh penuh. Masyarakat sangat segan dan hormat terhadap Sultan, sehingga apa yang diinstruksikan tidak pernah dibantah karena dianggap benar semuanya. Dilain pihak Sultan selain memimpin urusan dunia/pemerintahan ia juga berkewajiban memimpin dalam soal-soal keagamaan. Secara teori Sultan adalah "Tubadilur Rasul", pengganti rasul. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat bahasa dan tulisan Arab yang tertera pada Cap Kesultanan. Karena itu pula Sultan dianggap sebagai pelindung rakyat karena memiliki kekuatan sakti yang dapat dipergunakan

untuk membebaskan rakyatnya dari berbagai bahaya. Oleh sebab itu maka Sultanlah yang dianggap sebagai “Dewa” sehingga selalu disembah.

Didalam kehidupan sehari-hari, perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak menyangkut struktur pemerintahan dan kepemimpinan sedangkan pola-pola kemasyarakatan itu sendiri tetap dipertahankan antara lainnya sifat toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Jiwa kegotong royongan merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak jaman dahulu kala.

Bentuk dan sistem pemerintahan kesultanan berlangsung sampai pada masa pemerintahan Sultan Hi Djafar Syah; Sultan Tidore yang ke 36 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999 M atau hari Senin tanggal 8 Rajab 1420 H. Sistem pemerintahan model ini kemudian di perkuat dengan Plakat Sultan yaitu terdiri dari 28 pasal. Ke 28 pasal itu di kenal sebagai “Peranan Kiyse se Kolano”. Plakat Sultan itu di beri cap Kesultanan yang bertulisan “Chlifutul Mukarram Syaidiss Akalaini Ala Jablit Tidore” yang berarti “Aku yang mulia bertahta di atas singga sana dan memerintah atas bala rakyat, jin dan manusia” di dalamnya tertulis nama dan tugas dari mereka. Plakat ini di tetapkan di dalam Rapat Dewan Kementrian (Ronga Lolamo). Di dalam Plakat itu tertulis nam dan tugas dari masing-masing. Secara umum urusan yang harus di tangani oleh ke 19 pejabat adalah urusan-urusan pemerintahan, tata usaha (kesekretariatan), ketertiban dan keamanan serta urusan keagamaan yang menurut lazimnya di jalankan oleh wakil-wakil rakyat dari Bobato Yade se Soasio, Bobato Sangaji se Gimalah Tou Moi se Malofo, Bobato Nyili Gamtumdi dan Nyili Gamtufkange, Nyili Lofolofu dan Nyili Gulu-gulu.

Setiap tahun para pemimpin yakni Sangaji, Kapita Lau Kimalaha dan Famanyira datang ke Soa Sio membawa upeti (persembahan) sekaligus menyampaikan laporan tentang keadaan wilayah serta menerima informasi, pemerintahan serta keperluan lain meliputi adat dan Labee (Syaraa) dari Sultan. Dalam pemerintahannya Sultan sering melakukan pendelegasian tugas yang di tujukkan kepada para Bobato Adat Pehak Raha sebagai pelaksana kekuasaan di bidang pemerintahan, tata usaha, keamanan ketertiban, keagamaan dan pelayanan kemasyarakatan dengan selalu menetapkan adat dan agama sebagai sumber inspirasi dan aspirasi.

Lembaga adat pada masyarakat Tidore pada dasarnya merupakan struktur status dan peran yang terdapat dalam Kesultanan Tidore. Secara adat, masyarakat Tidore mempercayai dunia nyata dan dunia gaib. Dunia nyata yang diwujudkan dalam suatu pemerintahan (tradisional) menempatkan seorang Sultan sebagai pemimpin.

Untuk dunia gaib, peran sowohi menjadi sangat penting. Sebab kedudukannya ini, seorang sultan yang baru terpilih di Kesultanan Tidore harus direstui (dilantik) oleh sowohi. "Pengakuan" sultan terhadap sowohi ini mengandung nilai demokrasi yang sangat tinggi, dalam bentuknya yang tradisional dan dipertahankan secara turun-temurun dalam tradisi orang Tidore. Meski dalam praktiknya, seorang sultan lebih menonjol (nyata) dari pada sowohi, tetapi keberadaan (eksistensi) seorang sowohi tetap menjadi penting di balik pemerintahan yang dijalankan oleh sultan.

Tempat para sowohi menjalankan aktivitasnya disebut fola sowohi di Gurabunga, sebuah kampung yang terdapat di ketinggian Kie Matubu. Fola sowohi, yang berarti "rumah sowohi" merupakan bangunan yang dihuni oleh seorang sowohi. Di dalam rumah ini terdapat alat-alat dan bahan ritual yang terus dijaga dan dirawat dengan segala kesakralannya. Pada waktu-waktu tertentu, sultan Tidore akan meminta pertimbangan atau nasehat dari sowohi untuk keselamatan seluruh rakyat Tidore. Tidak hanya berlaku bagi sultan, seorang wali kota yang terpilih di Kota Tidore Kepulauan juga akan meminta restu dari sowohi ketika baru saja terpilih. Serupa dengan sultan, pada waktu-waktu tertentu juga wali kota akan mengunjungi sowohi jika dirasakan perlu. Keyakinan terhadap kemampuan sowohi untuk menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib ini merupakan nilai sekaligus praktik bagi keberlanjutan dan keharmonisan masyarakat di Tidore Kepulauan.

Nilai-nilai multikultural dalam penelitian ini mencakup nilai tentang kesederajatan, keterbukaan, perlakuan yang sama, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, solidaritas, dan dialog. Selain itu, nilai yang juga menjadi perhatian penelitian adalah toleransi, kebersamaan, dan harmonisasi, dalam konteks perbedaan atau keragaman masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan antara sultan dengan sowohi, wali kota dengan sowohi, dan sultan dengan wali kota, berlangsung dalam suasana kesederajatan, keterbukaan, demokratis, dan penuh dialog.

Berbagai nilai yang dipraktikkan dalam kelembagaan masyarakat Tidore ini telah berlangsung secara turun temurun dan terus bertahan hingga saat ini. Nilai-nilai multikultural yang melandasi praktik multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun secara kolektif (sosial dan politik), mozaik yang memperindah masyarakat. Prinsip keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas merupakan ideologi yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi. Dalam masyarakat multikultural,

interaksi antara masyarakat dengan berbagai kebudayaan berbeda-beda tersebut berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan tercapai di antara berbagai perbedaan budaya tersebut karena dipandang dan ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar dan setara.

b) Penguatan Kapasitas Politik

Lembaga politik lokal, secara tradisional dalam masyarakat Tidore Kepulauan meliputi unsur kesultanan Tidore dan perangkatnya dalam struktur pemerintahan tradisional (sowohi, sangaji, bobato, tulilamo, dll). Secara formal, terdapat pemerintahan mulai dari wali kota, camat, lurah/desa, hingga RW dan RT. Selain lembaga politik dalam pemerintahan, terdapat pula lembaga politik berupa organisasi-organisasi politik yang merupakan wadah bagi penyaluran aspirasi-aspirasi politik warga.

Dalam sejarah politik orang Tidore mereka termasuk berafiliasi dengan partai politik Islam, yakni Masyumi. Afiliasi ini telah berlangsung sejak era Orde Lama. Meski partai ini tidak ada lagi saat ini, tetapi pengikut/partisan partai ini umumnya bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Memang hal ini tidak tampak menyolok dan ekstrim antara pengikut partai politik yang berbeda satu dengan lainnya. Terhadap penganut partai politik berbeda, interaksi berlangsung harmonis dan saling menghargai. Prinsip-prinsip multikulturalisme yang berkaitan dengan keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas merupakan ideologi yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi, berlangsung dengan baik.

Lembaga-lembaga politik dalam masyarakat Tidore berperan sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi dan ekspresi politik kehidupan sehari-hari. Melalui lembaga ini, suasana multikulturalisme dijaga dan dirawat untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang harmonis. Pada tataran pemerintahan lokal tradisional, perangkat kesultanan dan lembaga-lembaganya berperan dalam hal menata fungsi masing-masing pihak agar berjalan sesuai kedudukannya. Sultan Tidore, sebagai pemimpin tradisional, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pemerintahan (tradisional). Dalam praktiknya, sultan tidak bertindak sendiri jika menyangkut kehidupan bersama warganya. Ia mendapat masukan atau pertimbangan dari perangkat-perangkatnya. Pada tingkat lembaga politik formal (modern), seperti partai politik dan pemerintahan (mulai dari tingkat wali kota hingga lurah/desa), berperan

sebagai wadah penyaluran aspirasi dan hak-hak politik warga Tidore dalam bingkai kehidupan NKRI.

Lembaga politik lokal, baik secara tradisional maupun modern, perlu didukung oleh anggota-anggota yang memiliki kemampuan mengelola lembaga, berwawasan luas (kondisi lokal dan nasional), memahami tugas dan tanggung jawab berdasarkan kedudukannya. Sultan dan perangkatnya, meski merupakan pemerintahan tradisional dan bersifat informal, tetap perlu memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan kondisi-kondisi eksternal di luar Tidore. Dalam arti, bahwa mereka juga harus memahami kondisi bangsa secara nasional. Hal ini berguna dalam merespons isu-isu politik di tataran nasional, terutama yang berkaitan dengan keberadaan orang atau kesultanan Tidore.

Upaya penguatan kapasitas bagi kesultanan dan perangkatnya dilakukan dalam waktu yang relatif panjang tidak formal. Para perangkat kesultanan, hanya bisa diduduki oleh mereka yang memiliki garis keturunan pada posisi-posisi tertentu. Hal ini dapat dilihat dari marga-marga tertentu saja. Calon penerus, yang merupakan anak-anak dari orang tua yang sedang menduduki perangkat kesultanan, telah dibina dan dipersiapkan sejak lama. Anak-anak ini biasanya dibawa atau dilibatkan dalam acara-acara adat yang digelar menurut adat kesultanan dan tradisi orang Tidore secara luas.

Nilai-nilai multikulturalisme dalam aspek politik masyarakat Tidore dapat dilihat dalam hal penghargaan pada perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas. Lembaga-lembaga politik lokal (formal/modern dan informal/tradisional) menjalankan fungsi dan tugasnya di atas nilai-nilai multikulturalisme tersebut.

c) Penguatan Kapasitas Pemuda Berbasis Politik

Pemuda Tidore memiliki banyak organisasi, baik dalam lingkup Tidore (berada di Kota Tidore Kepulauan), maupun di luar wilayah Tidore. Dalam penelitian ini, organisasi pemuda yang berkedudukan di luar Tidore terutama yang menjadi perhatian utama adalah yang berada di Kota Ternate. Hal ini dilakukan karena melihat peran aktif organisasi-organisasi ini dalam penguatan identitas ketidorean melalui aktivitas organisasi masing-masing.

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, organisasi-organisasi seperti Garda Nuku dll aktif menggalang pemuda dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun dan menguatkan identitas sebagai orang Tidore. Selain itu, organisasi Ikatan Keluarga Tidore (IKT) yang berada di Ternate juga sangat berperan

dala merekatkan idnetitas mereka sebagai orang Tidore. Belakangan, organisasi pemuda yang merupakan anak-anak muda dari Tidore menghimpun diri dan aktif melakukan kajian atau diskusi di Kota Tidore Kepulauan.

Beberapa organisasi yang secara de facto berada di Kota Ternate, tetapi dirintis, dibangun, dan didominasi oleh pengaruh aktor-aktor pemuda Tidore. Garasi Genta, misalnya, suatu organisasi yang bergerak dalam bidang seni budaya termasuk aktif dalam membina kader dan menyelenggarakan kegiatan. Demikian pula dengan organisasi Garda Nuku.

Dalam bingkai NKRI, ideologi organisasi-organisasi orang Tidore tetap nasionalis. Maksudnya, bahwa keberadaan organisasi ini tetap dibangun di atas semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di atas landasan ideologi inilah identitas ketidorean terus dibangun dan dikembangkan. Untuk menguatkan kesadaran masyarakat Tidore sebagai "orang Tidore", organisasi-organisasi melakukan aktivitasnya.

Aktivitas organisasi yang berkaitan dengan penguatan identitas ketidorean berupa: diskusi atau kajian terkait Tidore (sejarah masa lampau dan eksistensinya saat ini), festival seni-budaya, dan sosial politik. Diskusi atau kajian-kajian terutama makin marak belakangan ini (2019). Seiring dengan kondisi ini, kegiatan festival seni budaya juga makin intensif. Selain dilakukan secara rutin oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terdapat juga festival-festival yang digelar di desa/kampung/kelurahan, yang pada dasarnya mengangkat identitas ketidorean mereka. Adanya dorongan dari pemerintah pusat, melalui Dirjen Kebudayaan, membuat pergekeran kegiatan festival kian bersemangat. Dalam bidang sosial, termasuk yang paling menonjol adalah IKT. Salah satu kegiatan IKT yang paling terkenal adalah barifola. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial berupa pembangunan rumah bagi warga Tidore yang membutuhkan berdasarkan hasil survei atau pantauan pengurus IKT. Meski pada awalnya barifola hanya menysar warga Tidore, tetapi saat ini aktivitas barifola juga menysar warga di luar orang Tidore.

Organisasi pemuda Tidore ada berkedudukan di dalam Tidore atau pun di luar Tidore. Di luar Tidore, kebanyakan organisasi ini berada di Ternate. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan orang Tidore yang sudah sejak lama tinggal di Ternate. Orang-orang Tidore di Ternate memiliki kedudukan penting di pemerintahan. Wali Kota Ternate, Burhanuddin Abdulrahman, adalah orang Tidore. Beberapa pejabat pada dinas tertentu di Ternate juga diduduki oleh orang Tidore.

Upaya penguatan kapasitas bagi anggota atau kader organisasi dilakukan menurut kreativitas masing-masing lembaga. Di bawah bimbingan para senior, anggota-anggota organisasi diarahkan secara positif untuk mencapai terwujudnya kemampuan (kapasitas) yang makin baik. Penguatan intelektual dilakukan melalui kajian atau diskusi, baik secara rutin maupun insidental. Selain itu, para anggota organisasi yang merupakan generasi muda Tidore mendapatkan tambahan wawasan/pengetahuan dan pengalaman dari kalangan generasi tua dalam satu organisasi yang sama atau organisasi berbeda. Di dalam organisasi, mereka juga mengembangkan dialog di antara para anggota. Perbedaan pendapat terhadap satu atau beberapa permasalahan dikomunikasikan sehingga semua pihak memahami permasalahan dengan baik. Pada akhirnya, pandangan atau tindakan secara kelembagaan tidak mewakili pandangan pribadi anggota, melainkan langkah organisasi.

Nilai-nilai multikulturalisme dalam organisasi pada masyarakat Tidore di antaranya berupa penghargaan pada perbedaan, kesederajatan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan rasa solidaritas. Berbagai aspek perbedaan: umur, pandangan, pendidikan, lingkungan sosial, tidak menjadi masalah dalam organisasi orang Tidore. Semua pihak dianggap memiliki kedudukan setara. Meski demikian, penghargaan terhadap perbedaan usia, latar belakang pendidikan dan sosial tetap menjadi perhatian dan penting.

Nilai-nilai kegotongroyongan dan solidaritas senantiasa dipupuk untuk menciptakan kondisi harmonis. Rasa peduli terhadap sesama manusia pada orang Tidore tidak dibatasi oleh sekat wilayah. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas organisasi IKT. Melalui barifola, mereka saling membantu, baik sesama orang Tidore maupun di luar Tidore. Barifola tidak hanya menyasar orang Tidore, melainkan berlaku juga untuk orang di luar Tidore. Demikian pula dari segi agama yang dianut warga sasaran, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga menjangkau kalangan Kristen.

D. PENUTUP

Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai multikultural menjadi landasan dalam setiap aktivitas individual dan kolektif orang Tidore. Hal ini berlaku dalam sistem kepemimpinan tradisional (sultan dan perangkat kesultanan) dan modern (wali kota dan struktur pemerintahan paling bawah). Nilai-nilai multikulturalisme dalam aspek politik dan organisasi masyarakat Tidore dapat dilihat dalam hal penghargaan pada

perbedaan, kesederajatan, persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak azasi, dan solidaritas. Lembaga-lembaga politik lokal (formal/modern dan informal/tradisional) menjalankan fungsi dan tugasnya di atas nilai-nilai multikulturalisme tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. U. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Pergaulan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatara.
- Amal, M.A. 2010. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950* (Edisi Kedua). Jakarta: KPG (Kepustakaan Gramedia Populer).
- Bubandt, N. 2004. "Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indoensia Timur", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 28(74): 12-32*.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. (Terjemahan bahasa Indonesia) Alih Bahasa: Mestika Zed dan Zulfami. Jakarta: yayasan Obor Indonesia. Hlm: 81-85.
- Carneiro da Cunha, M. 1986. *Negors, estrangeiros*. Sao Paulo.
- Cohen, A.P. 1985. *The Symbolic Construction of Community*. Chicester.
- Denzin, N. K., dan Lincoln, Y. S. 2009. "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif", dalam *Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gellner, E. 1983. *Nation and Nationalism*. London.
- Faisal, Moch. (2008). "Dari Anarchic Cyber Space menjadi Transnational Public Sphere: Membaca Relasi antara Cyberspace dan Civil Society di Era Postmodern". *Global Jurnal Politik Internasional, Vol. IX(2)*.
- Huberman, A. M., dan Miles, M. B. 2009. "Manajemen Data dan Metode Analisis", dalam *Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 591-612.
- Inglis, C. 1996. "Multiculturalism, NewPolicy Responses ti Diversity", dalam *MOST. Policy Papers No. 4. Paris; UNESCO*.
- Ismail, Ahmad., Hardiyanti Mungsi, dan Amril Hans. 2019. "Online Social Movement: Adopsi Teknologi Informasi dalam Melakukan Gerakan Sosial di Indonesia." *Jurnal ETNOSIA Vol. 4(1): 91-114*.
- Lubis, A.Y. 2004. "Memahami 'Cultural Studies' dan Multikulturalisme dari Perspektif Pascamodern", dalam *Jurnal Wacana Vol 6(2): 103-131*.
- Murray Li, Tania. [SEP]2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Margin Kiri.
- Nachrawy, Herry., dan Doa, Hasan. 2007. *Nasionalisme, Diplomasi, dan Demokratisasi*. Ternate: Yayasan Kieraha.
- Nugroho, Yanuar. (2011). @ksi Warga: Kolaborasi, demokrasi partisipatoris dan kebebasan informasi – Memetakan aktivisme sipil kontemporer dan penggunaan media sosial di Indonesia. *Laporan. Kolaborasi penelitian antara Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester dan HIVOS Regional Office Southeast Asia*. Manchester dan Jakarta: MIOIR dan HIVOS.
- Poespowardojo, S. 2000. "Kritik Budaya dalam Rangka Memasuki Abad Baru", dalam *Jurnal Wacana Vol. 2(1): 1-17*.

- Robinson, K. 2000. "Ketegangan Antarsukubangsa, Orang Bugis, dan Masalah 'Penjelasan'", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 63: 44-52.
- Saleh, Laiman., dan Faroek, M. Amin. 2006. *Mengenal Kesultanan Tidore*. Tidore: Lembaga Kesenian Keraton Limau Duko Kesultanan Tidore.
- Silverman, D. 2006. *Qualitative Research: Theory, Method and Practice (Second Edition)*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Singgih, Pdt. E. G. 2002. "Etnisitas dan Identitas: Sebua Pengantar" dalam Ubed S. Abdillah, *Politik Identitas Etnis. Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara, hlm.: ix-xii.
- Scoot, J. (2007). *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial baru*. Penerbit Resist Book. Yogyakarta.
- Spencer, M. E. 1994. "Multiculturalism, "Political Correctness," and the Politics of Identity", dalam *Jurnal Sociological Forum*, Vol. 9, No. 4, pp. 547-567.
- Sumar-Karman, A., Abdulrahman, S., Arlinah, Wildan, Syahpora. 2013/2014. *Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Maluku Utara*. Laporan Penelitian. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.
- Tahara, Tasrifin.^[1]_{SEP}2014. *Melawan Stereotip*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Wilkinson, S. 2006. "Focus Group Research", dalam David Silverman (Eds) *Qualitative Research: Theory, Method and Practice (Second Edition)*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. Hlm.:177-199.